



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **EFEKTIFITAS PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PURUS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

## **SKRIPSI**

*Skripsi diajukan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**MUHAMMAD RIZKY ALFARIZY**

**NIM. 11727101988**

**PROGRAM JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2021**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “ **EFEKTIFITAS PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN SWADAYA GOTONG ROYONG MASYARAKAT DI KELURAHAN PURUS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**”

yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD RIZKY ALFARIZY

NIM :11727101988

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

**BASIR, SHI, M. Hum**  
**NIK. 130217026**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Efektifitas Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kelurahan Purus Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan"* yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD RIZKY ALFARIZY**

NIM : 11727101988

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Agustus 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua

**Drs. H. Zainal Arifin, M.A**

Sekretaris

**Hellen Last Fitriani, SH., MH**

Penguji I

**Dr. Hj. Hertina, M.Pd**

Penguji II

**Lovelly Dwina Dahren, SH.,MH**



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 10741006 200501 1 005



## ABSTRAK

**Muhammad Rizky Alfarizy, 2021: Efektifitas Peran Lembaga Pemberdaya Masyarakat dalam Meningkatkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Purus Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.**

Penelitian ini mengkaji tentang Efektifitas Peran Lembaga Pemberdaya Masyarakat Dalam Meningkatkan pembangunan Di Kelurahan Purus Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan Pembangunan di Kelurahan Purus Kota Padang, serta untuk mengetahui Apa kendala yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan Pembangunan di Kelurahan Purus Kota Padang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana efektivitas peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan Pembangunan di Kelurahan Purus Kota Padang, serta untuk mengetahui Apa kendala yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan Pembangunan di Kelurahan Purus Kota Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Sedangkan Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Purus dalam meningkatkan Pembanguna belum efektif , hal ini terlihat dari belum terlaksananya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator, Motifator, dan Dinamisor.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektifitas Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan di Kelurahan Purus Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk yang tercinta, Ayahanda Syafrizal Bahar dan Ibunda Yelmi serta Adinda Tercinta Alqolisa Sofia Maharani dan Muhammad Syauki Alfarez yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas., M.Ag Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. Bapak Dr. Wahidin S.Ag., M.Ag Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. Bapak Dr. Magfirah, MA. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Basir, S.H.I., M.H. Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibunda Lovelly Dwina Dahren, S.H.M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2017, terkhusus Kelas Ilmu Hukum C, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis,

**Muhammad Rizky Alfarizy**  
**NIM. 11727101988**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kelurahan Purus .....	14
B. Visi dan Misi .....	14
C. Letak Geografis Kelurahan Purus .....	15
D. Gambaran umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purus .....	21
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Efektifitas.....	24
B. Teori Peran .....	27
C. Teori Demokrasi.....	29
D. Teori tentang Azas – azas Umum Pemerintahan yang Baik .....	32
E. Teori tentang Kelurahan.....	36
F. Tinjauan Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat .....	39



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Efektifitas Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan di Kelurahan Purus Kota Padang .....	50
B. Hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melaksanakan Peran untuk Meningkatkan Pembangunan Di Kelurahan Purus Kota Padang.....	63

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	Batasan Wilayah Kelurahan Purus .....	15
Tabel II.2	Populasi Penduduk Kelurahan Purus .....	16
Tabel II.3	Pendidikan Kelurahan Purus .....	17
Tabel II.4	Agama Kelurahan Purus.....	17
Tabel IV.5	Efektifitas Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kelurahan Purus Kota Padang	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Wilayah Kelurahan Purus .....	16
--	----

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kelurahan merupakan salah satu wilayah administrasi dalam suatu Pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan karismatik mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sedangkan dikatakan suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materi maupun formal, universal sifatnya, sistematis dan spesifik (khas).<sup>1</sup>

Pemerintah adalah suatu badan atau lembaga publik yang mempunyai tugas dalam mewujudkan tujuan negara dimana sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaan kepemimpinan, pembangunan masyarakat serta koordinasi pemerintah dari segala lembaga yang ditempati<sup>2</sup>. Dalam ruang lingkup Ilmu Pemerintahan, dibidang ketatalaksanaan dibagi menjadi 7 administrasi pemerintahan, yaitu Administrasi Pemerintahan Pusat, Administrasi Pemerintahan Daerah, Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Administrasi Pemerintahan Kelurahan, Administrasi Pemerintahan Tingkat Departemen,

<sup>1</sup> M. Hasan Ubaidillah, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, (Surabaya: UIN SUNAN AMPEL Press, 2018), h.12

<sup>2</sup>Uci Putri Setia Ningsish “Pengertian dan Bentuk-bentuk Pemerintahan”. file:///C:/Users/User/Downloads/(HAN)%20PENGERTIAN%20DAN%20BENTUK.pdf.(Diakses pada 20 Desember 2020, Pukul 22. 49)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Administrasi Lembaga Non Departemen dan Administrasi Pemerintahan Desa.<sup>3</sup>

Dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 tahun 2017 tentang lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang dimaksud dengan Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan yang wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>4</sup>

Kelurahan merupakan organisasi pemerintahan dengan ruang lingkup yang lebih kecil dan diberi wewenang untuk mengatur daerah nya sendiri, sama halnya jika dibandingkan dengan pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD Menurut asas Otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Daerah-daerah dindonesia diberi kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri yang disebut Otonomi daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> M. Hasan Ubaidillah, *Op. Cit.* h. .7.

<sup>4</sup> Perda Kota Padang Nomor 9 tahun 2017, tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

<sup>6</sup> Arum Sutriani Putri "Pengertian otonomi daerah dan dasar hukumnya" <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/110000069/pengertian-otonomi-daerah-dan-dasar-hukumnya>. (Diakses pada 20 Desember 2020, pukul 23.24).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk mewujudkan Kelurahan yang sejahtera tugas Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan sangat luas dan berat. Oleh karena itu diperlukan wadah partisipasi masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sangat membantu kelancaran masyarakat Kelurahan khususnya dibidang pembangunan. Tujuan dari lembaga masyarakat ini adalah membantu penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan dan oleh Kelurahan. Oleh karena itu, ia menjadi wadah partisipasi masyarakat Kelurahan dalam rangka menunjang pembangunan pemerintah maupun Kelurahan. Selain daripada itu, lembaga kemasyarakatan ini merupakan alat penghubung antara masyarakat dan Kelurahan, menumbuhkan inisiatif masyarakat, meningkatkan keterampilan, merubah cara berfikir dan bekerja tradisional menjadi rasional ilmiah, untuk merubah kesejahteraan masyarakat. selain sebagai wadah partisipasi masyarakat, Lemaga Kemasyarakatan juga merupakan wadah seluruh pembangunan di Kelurahan sekaligus wadah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan masyarakat dan lembaga lain dalam pembangunan di Kelurahan.<sup>7</sup>

Kelurahan merupakan ujung terdepan wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu perlu secara terus menerus difikirkan dan selanjutnya direalisasikan agar Kelurahan dapat maju. Upaya kelurahan untuk maju , bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun aparatur

---

<sup>7</sup> IBayu Suriyaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), h. 170

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kelurahan dan mitra-mitra yang terlibat. Aparatur Kelurahan perlu memberikan dorongan bagi pengembangan kegiatan usaha di wilayahnya.<sup>8</sup>

Dalam menjalankan pemerinthan kelurahan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra Kelurahan untuk meningkatkan pembangunan dalam hal memberdayakan masyarakat. Adapun yang mencakup kedalam Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ini yang pertama adalah RT, yang kedua RW, dan yang ketiga adalah Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga yang sangat penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan swadaya masyarakat adalah Lembaga Pemberayaan Masyrakat (LPM). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah Kelurahan untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah di bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan menyusun

---

<sup>8</sup> Sujono, *Mengembangkan Potensi Masyarakat di desa atau Kelurahan*. (Yogyakarta:CV Budi Utama), 2012,h. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan.<sup>9</sup> Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*, Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : Pertama, *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, *Epowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai buaya modern seperti kerja

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 tahun 2017, tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan<sup>10</sup>. Pemberdayaan masyarakat digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendaya gunakan potensi dan sumber daya sendiri<sup>11</sup>

Kemudian penulis melihat masih kurang berperannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan pembangunan khususnya dikelurahan purus Kota Padang sebagai mana yang telah diamanatkan, dalam peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, pasal 40 Lembaga Pemberdayaan masyarakat memiliki tugas,

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,
2. Mengerakkan dan mengkoordinasikan swadaya gotong royong masyarakat,
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan baik yang berasal dari kegiatan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, swadaya gotong royong masyarakat,
4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya masyarakat, dan
5. Memelihara dan mengembangkan nilai nilai agama, adat, dan budaya masyarakat.

<sup>10</sup> Munawar Nur, “Pemberdayaan Masyarakat”. Jurnal Ilmiah Civis Vol.1 No.2, Juli 2011.h. 87.(Diakses pada 20 Desember 2020, Pukul 23. 40)

<sup>11</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018, tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat tugas tersebut sangat penting untuk dilaksanakan untuk kemajuan, meningkatkan kualitas, dan pembangunan. Dimana sejatinya Program pembangunan yang dibuat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat akan menggunakan swadaya gotong royong masyarakat, tanpa adanya masyarakat yang menyumbangkan swadaya nya maka program tersebut tidak akan berjalan.

Karna kurang berperannya lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purus terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul

**“EFEKTIFITAS PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PURUS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN”**

**B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu khusus tentang efektifitas Pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purus Kota Padang berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 9 Tentang lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bagian ke lima pasal 40 ayat 1 mengenai Lembaga pemberdayaan masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Kelurahan Purus berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ?
2. Apa hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan pembangunan?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Kelurahan Purus Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 tahun 2017 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat purus berdasarkan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 9 tahun 2017 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan.

### E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Strata Satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Hukum Tata Negara dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin

meneliti lebih lanjut.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian masukan dan sumbangan pemikiran bagi Hukum Tata Negara.

## F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan.<sup>12</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi di adakan penelitian ini adalah di Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan purus, jln bandar Purus Nomor 65. Kota Padang, Sumatera Barat. dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi ini, karena penulis melihat di Lembaga Pemberdayaan msyarakat Kelurahan Purus Kota Padang, Sumatera masih ada terdapat problematika sehingga terkendala dalam pelaksanaan tugas lembaga Pemberdayan masyarakat

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 tahun 2017 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan

### 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,<sup>14</sup> yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.30

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 31

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 118.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lurah di kelurahan Purus, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Pemuda di Kelurahan Purus

Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>16</sup> Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah purposive sampling. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Lurah di Kelurahan Purus, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 3 orang ketua RW, 25 orang RT dan 2 orang Ketua Pemuda.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung di Kelurahan Purus
- b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan Lurah Kelurahan Purus, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 3 orang Ketua RW dan 2 orang Ketua Pemuda di Kelurahan Purus.
- c. Angket, yaitu suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang dijawab secara tertulis oleh 25 orang Ketua RT di Kelurahan Purus.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab di uraikan dalam sub-bab, sehingga antara satu bab dengan yang bab lainnya merupakan suatu sistem dan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 119.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematikan Penulisan

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan di uraikan gambaran Lokasi Penelitian, Sejarah Kelurahan purus Kondisi Geografis Kelurahan purus, Komposisi Penduduk Kelurahan Purus, Kondisi Sosial Budaya Kelurahan purus, Sejarah Lembaga Lembag, Visi dan Misi Lembaga Pemasya pemberdayaan masyarakat Purus Kota Padang, Stuktur Organisasi Lembaga pemberdayaan masyarakat purus

## **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini akan di uraikan Teori-Teori tentang Lembaga Pemberdayaan masyarakat, Tugas Lembaga Pembedayaan,, Proses pelaksanaan tugas, Pengertian swadaya,

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian. meliputi pembahasan Mengenai pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat purus kota padang. dan faktor-faktor yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghambat pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat purus kota padang.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kelurahan Purus

Kelurahan Purus merupakan salah satu kelurahan di kota Padang yang relatif berkembang lebih cepat seiring dengan berkembangnya kota. Perkembangan ini terutama karena lokasinya yang cukup strategis yaitu di tepi pantai Padang. Penataan daerah Kelurahan Purus memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Baik buruknya daerah Kelurahan Purus ke depan sangat ditentukan oleh peran stakeholder dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunannya sekarang.

#### B. Visi dan Misi

##### 1. Visi

Mewujudkan pelayanan prima serta menciptakan pariwisata yang aman, nyaman dan bersih

##### 2. Misi

- a. mewujudkan pelayanan prima
- b. Meningkatkan mutu pendidikan
- c. Melestarikan kebudayaan daerah
- d. menciptakan pariwisata yang aman, nyaman dan bersih<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Fajri Rahmad Ersya, S.STP, *Ekspose Lurah Purus Kecamatan Padang barat*, (padang: Kelurahan Purus, 2018) h. 2

### C. Geografis Kelurahan purus

Kelurahan Purus berada di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat. Luas kelurahan: 1 kilometer persegi. Jarak dari Kantor Kelurahan ke Ibukota Kecamatan adalah 1 kilometer, ke Ibukota Kota adalah 13,70 kilometer, ke Ibukota Provinsi adalah 1 kilometer.<sup>18</sup>

**Tabel II.1**  
**Batasan wilyah Kelurahan Purus**

Sebelah Utara	Kelurahan Rimbo Kaluang
Sebelah Timur	Kelurahan Ujung Gurun
Sebelah Selatan	Kelurahan Olo
Sebelah Barat	Samudra Indonesia

Sumber data: Peraturan Walikota Padang No 76 Tahun 2018

**Gambar II.1**

**Peta Wilayah Kelurahan Purus**



Gambar: Kelurahan Purus 2021

<sup>18</sup><https://langgam.id/kelurahan-purus-padang-barat-kota-padang/>. Diakses pada 21 Maret 2021, Pukul 22. 49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Keadaan Penduduk Kelurahan Purus

Kelurahan Purus terdiri dari 8 RW dan 28 RT. Kelurahan Purus mempunyai jumlah penduduk 8250 jiwa. Dengan perbandingan jumlah penduduk dari semua tingkatan usia, 4179 laki-laki dan 4071 perempuan.

**Tabel II.2**  
**Populasi Penduduk kelurahan Purus**

NO	Kelurahan Purus	Populasi Penduduk
1	Laki – Laki	4179
2	Perempuan	4071
3	Jumlah	8250

## 2. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu sarana yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah, karena pendidikan mempengaruhi pola pikir penduduk suatu daerah. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan

**Tabel II.3**  
**Pendidikan Kelurahan Purus**

No	Sub Indikator	Jumlah
1	SD	6
2	SLTP	1
3	SLTA	1
4	Perguruan Tinggi	0
5	Jumlah	8

Suber data: Ekspose Lurah Purus Kecamatan Padang Barat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Agama

Agama merupakan tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain serta manusia dengan lingkungannya, yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Agama-agama tertentu serta kepercayaan tertentu banyak mempunyai narasi, dan simbol serta sejarah suci yang mempunyai maksud untuk menjelaskan berbagai macam makna kehidupan dan menjelaskan asal usul kehidupan dari alam semesta ini.<sup>19</sup>

Mayoritas penduduk Kelurahan Purus memeluk agama Islam. Kebanyakan pemeluknya adalah orang Minangkabau

**Tabel II.4**  
**Agama Kelurahan Purus**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	7.891
2	Kristen	176
3	Budha	84
4	Hindu	99
5	Jumlah	8.250

Sumber Data: Ekspose Lurah Purus Kecamatan Padang Barat

### 4. Potensi wisata kelurahan purus

Setiap wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Padang, pastinya akan direkomendasikan untuk datang ke salah satu pantai yang terindah di kota ini, yaitu Pantai Purus. Lokasi pantai yang sangat dekat dengan pusat kota dan juga akses yang cukup mudah untuk mencapainya

<sup>19</sup> <https://belajargiat.id/agama/>. Diakses pada 8 juli 2021, Pukul 22.04



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena pantai ini terletak di tepi jalan raya pastinya membuat setiap wisatawan yang berkunjung akan tertarik untuk singgah disini.

Pantai Purus yang berlokasi di barat Kota Padang yang sejajar dengan berbagai objek wisata yang lain seperti Pantai Padang yang hanya berjarak 2 km dan juga Taman Muaro Binguang yang letaknya bersebelahan dengan Pantai Purus. Pantai Purus ini memiliki pesisir yang landai, cantik, dan area pasirnya juga cukup luas dengan memiliki lebar 30-50 m dari jalan raya sampai ke arah laut dengan memiliki tekstur yang halus dan lembut sehingga sangat cocok digunakan untuk arena bermain pasir bagi anak-anak yang dibawa ke tempat ini. Pasir Pantai Purus ini tidak berwarna putih bersih, akan tetapi berwarna kecoklatan. Ombak yang terdapat di pantai ini cukup besar yaitu sekitar 2 m dan juga bergulung-gulung dengan memantulkan bunyi yang keras.

Ombak pantai ini juga sering dijadikan wahana untuk berselancar para peselancar. Untuk urusan kuliner, Pantai Purus ini juga merupakan daerah jagonya kuliner seafood yang terdapat di Kota Padang. Berbagai warung seafood yang menjual lauk-lauk yang segar dan baru ditangkap tentunya ada disekitar pantai ini. Disarankan bagi para wisatawan untuk datang kala sore mulai menjelang karena panorama sunset yang terdapat di pantai ini pastinya sangat bagus dan juga Seperti halnya di Pantai Padang, Pantai Purus ini juga terdapat banyak dermaga pemecah ombak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemandangan di dermaga ini tak kalah menarik bagi para pengunjung yang melepas penglihatannya ke arah sepanjang pantai ini.<sup>20</sup>

Dan yang semakin memanjakan para pengunjung, Di kawasan Pantai Padang juga sudah muncul beberapa objek wisata baru, seperti Monumen IORA yang sering dimanfaatkan untuk spot foto. Kemudian ada Monumen Merpati Perdamaian yang berada ditengah-tengah kerumunan cafe payung dibibir pantai tempat menikmati berbagai macam kuliner yang lezat.

Tepat disekitar monumen, tersedia area bermain anak lengkap dengan berbagai jenis jasa permainan dengan harga terjangkau. Bagian ini sedikit terpisah oleh muara yang membelahnya dari Pantai Padang dengan jembatan sebagai pengikat. Dan kemudian dikenal dengan nama Muaro Lasak. Terbaru, muncul Pantai Purus dengan teras yang besar dan lega dipinggir pantai. Teras ini juga nantinya berfungsi sebagai media untuk beragam acara ataupun event seperti salahsatunya Festival Siti Nurbaya.<sup>21</sup>

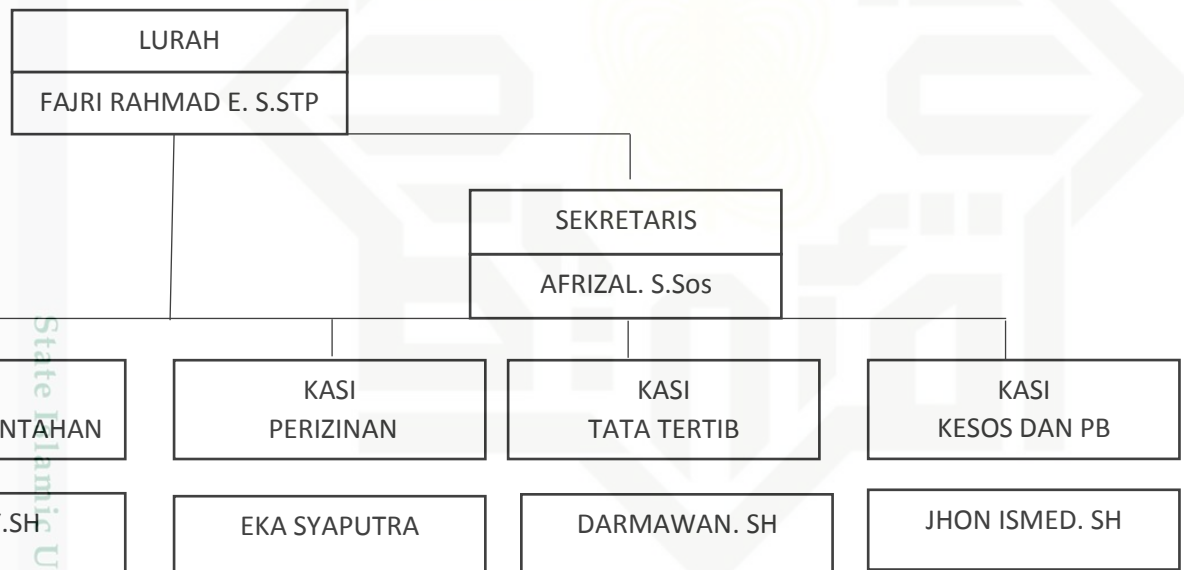
#### 5. Mata pencaharian Masyarakat Kelurahan Purus

Daerah purus terletak di tepi pantai Kota Padang hal ini sangat mempengaruhi pekerjaan masyarakat purus, mulai dari berdagang karna purus merupakan tempat yang strategis dan menjadi tujuan wisata bagi banyak orang hal ini sangat cocok untuk berjualan. Tidak hanya pedagang mayoritas masyarakat purus bermata pencaharian sebagai nelayan dan sangat mengandal kan potensi sumberdaya dari laut.

<sup>20</sup> <https://www.promo-jitu.com/2016/08/objek-wisata-pantai-purus-padang.html> Diakses pada 29 Juli 2021, Pukul 22.35

Sebagian nelayan Purus hidupnya sangat tergantung kepada kondisi alam. Pendapatan mereka sangat ditentukan oleh baik buruknya cuaca pada saat menangkap ikan, sehingga ketika cuaca buruk atau masa “ombak gadang”, penghasilan mereka pun akan turun, karena sedikitnya penghasilan yang diperoleh. Untuk mengantisipasi itu sebagian rumah tangga nelayan, menambah penghasilan mereka dengan mengandalkan keterampilan yang dimiliki istri sebagai ibu rumah tangga, seperti; jualan dan bekerja sebagai tukang cuci.<sup>22</sup>

## 6. Struktur keorganisasian Kelurahan Purus



Sumber Data: Kelurahan Purus Kota Padang

<sup>22</sup> Delmira Syafrini, Nora Susilawati, dan Mira Hasti Hasmira, “Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Mengembangkan Kawasan Wisata Keluarga” Jurnal Sociens Vol. 3, No.2, Th. 2016 (Diakses pada 30 juli 202, Pukul 00.00)

## **D. Gambaran Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purus**

### **1. Sejarah Lembaga Pemerdayaan masyarakat**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa se Indonesia yang hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa / kelurahan.

Dalam forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional tersebut akhirnya terjadi kesepakatan Nasional yang dikenal dengan Deklarasi Bandung memuat 2 (dua) hal yang sangat fundamental yakni :

- a. Merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan (LKMD/K) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- b. Terbentuknya Asosiasi LPM secara nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP LPM).<sup>23</sup>

### **2. Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

Terwujudnya harmonisasi hubungan antara anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan aparatur pemerintahan desa Klari

<sup>23</sup>[https://web.facebook.com/353451161459884/posts/sejarah-lpm-lpm-dideklarasikan-pada-tanggal-21-juli-2000-melalui-forum-musyawara/396214813850185/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/353451161459884/posts/sejarah-lpm-lpm-dideklarasikan-pada-tanggal-21-juli-2000-melalui-forum-musyawara/396214813850185/?_rdc=1&_rdr). Diakses pada 23 Maret 2021, Pukul 22. 49



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seluruh lapisan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat desa guna mencapai kehidupan masyarakat desa yang tertib, aman, tenteram, sehat, sejahtera, mandiri, dinamis dan maju, berdasarkan kepastian hukum yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.

**b. Misi**

- 1) Membantu Lurah meningkatkan Pendapatan Asli Kelurahan melalui pengelolaan, pengembangan sumber dana dan sumber daya serta seluruh potensi Kelurahan secara transparan, akuntabel; responsibility, otonom, wajar dan taat hukum;
- 2) Membantu Lurah dalam meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur pemerintah Kelurahan melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan bimbingan;
- 3) Meningkatkan peran serta anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Kelurahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya;
- 4) Membantu Lurah meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan pembangunan Kelurahan, melalui penyuluhan dan urun rembuk;
- 5) Membantu Lurah meningkatkan mutu pelayanan administrasi, kependudukan, penanganan kesehatan gawat darurat, melalui pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran anggota LPM;
- 6) Membantu kepala desa meningkatkan ketertiban, kebersihan, kesehatan, keamanan, pendidikan, keagamaan, kesenian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebudayaan, dan olah raga, melalui gotong-royong dan penyuluhan;

- 7) Membantu Lurah meningkatkan index pendapatan keluarga dan penanganan anak terlantar melalui bimbingan dan penyuluhan usaha pertanian, usaha peternakan, usaha perdagangan, kelompok usaha bersama, kelompok keterampilan, dan jasa;
- 8) Membantu Lurah dalam meningkatkan bantuan permodalan usaha kepada golongan ekonomi lemah melalui pembentukan koperasi desa, badan usaha milik desa, arisan, serta usaha lain yang sah<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup><https://lpmkelurahanpurus.wordpress.com/lembaga-desa/lpm/visimisi-dan-tujuan-lpm/>, (Diakses pada 23 Maret 2021, Pukul 22. 49)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Efektifitas

##### 1. Pengertian Efektifitas

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan.<sup>25</sup> Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan.<sup>26</sup> Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>27</sup>

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber

<sup>25</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1975), h. 16.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), h. 1-2.

<sup>27</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Diakses pada 8 Juli 2021, Pukul 22.57), h. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.<sup>28</sup>

Jadi suatu kegiatan organisasi dapat dikatakan katakana efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

## 2. Ukuran Efektifitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 4

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.<sup>30</sup>

## B. Teori Peran

### 1. Pengertian Peran

Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (roleset). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status status social khusus<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Ibid, h. 56

<sup>31</sup> Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Sinar Terang, tt) h. 541

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranan dalam Kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. “ Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama (di dalam terjadinya suatu hal). Peranan juga yang berarti yang dimainkan, tugas kewajiban suatu pekerjaan. Peranan berarti bagian yang harus dilakukan di dalam suatu kegiatan.<sup>32</sup>

Peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan yang Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam penunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat Dan peranan juga diartikan sebagai serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran , Memberi penilaian, memberi sanksi dan lain –lain.<sup>33</sup>

### C. Teori Demokrasi

#### 1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Demos (rakyat) dan Cratos (kekuasaan), telah menjadi praktik politik bangsa Yunani sekitar (300-400

<sup>32</sup> Sahilun A. Nasir, *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problema Remaja*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 9.

<sup>33</sup> Sondang P. Siagan, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 72

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SM.) Demokrasi dalam istilah adalah keadaan negara di mana sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, keputusan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Demokrasi secara modern dirumuskan sebagai sebuah sistem pemerintahan dengan didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh, dan untuk rakyat, seperti dikatakan Presiden Amerika ke-16 Abraham Lincoln (1808-1865) “democracy is government of the people, by the people and for people”. Melalui sistem pemilihan tertentu, transformasi kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pemberian suara untuk meraih jabatan politik tertentu. Dalam kekuasaannya, aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui mekanisme yang telah disepakati.

Banyak pakar yang menjelaskan tentang praktik demokrasi, Thomas Meyer dalam buku *Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan* menyebutkan ada empat praktik teori demokrasi, yaitu teori demokrasi ekonomis, teori demokrasi langsung, teori demokrasi media populistik, dan teori demokrasi partisipasi partai. Sedangkan pemerintahan dikatakan mampu mewujudkan prinsip demokrasi bila memenuhi tujuh syarat: kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat tanpa ada ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.

Poin pentingnya, asas utama dalam demokrasi adalah posisi rakyat sebagai penguasa, kontrol, sekaligus kebebasannya menyuarakan pendapat dan mengkritik kebijakan yang mewakilinya di parlemen. Sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakikat demokrasi adalah: pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat<sup>34</sup>

## 2. Tujuan Demokrasi

Secara umum tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan.

Pada konsepnya tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta penjelasannya:

### a. Kebebasan Berpendapat

Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjaminan hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud.

### b. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban

Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk

---

<sup>34</sup> Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat.

c. Mendorong Masyarakat Aktif dalam Pemerintahan

Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara.

d. Membatasi Kekuasaan Pemerintahan

Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, ada di tangan rakyat. Artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan, agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, dimana Pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan

apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat.<sup>35</sup>

#### D. Teori Tentang Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik

##### 1. Pengertian Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (good governance and clean government).

Good Governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service disebut governance (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance” (pemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.<sup>36</sup>

##### 2. Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia juga mengatur tentang prinsip atau asas dari pemerintahan yang baik yaitu

<sup>35</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/>. Diakses pada 9 Juli 2021, Pukul 00.17

<sup>36</sup> Sedarmayanti, “*Kepemerintahan Yang Baik*” Bagian Kedua Edisi revisi, (Bandung: Rhineka cipta, 2012) h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan asas umum penyelenggara negara yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
- c. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- e. Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- f. Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### 3. Fungsi Asas – Asas Pemerintahan Yang Baik

Pada awal kemunculannya, asas-asas umum Pemerintahan yang baik hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan bahwa asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya<sup>37</sup>

Asas – asas umum Pemerintahan Yang baik dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah.<sup>10</sup> Dalam perkembangannya, Asas

<sup>37</sup> Solechan Alif, “Asas- Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik”. Jurnal Administrative Law & Governanc, Vol.2 No. 3, Agustus 2019, h. 546, Diakses pada 9 Juli 2021, Pukul 20.00

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

– asas umum Pemerintahan yang baik memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut :

- a. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies ermesen*/ melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatige daad*, *detournement de pouvoir*, *abus de droit*, dan *ultravires*.
- b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986.
- c. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau Pejabat TUN.
- d. AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu Undang-Undang.<sup>38</sup>

#### E. Teori tentang Kelurahan

##### 1. Pengertian Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 547

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan merupakan suatu pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal itu menyebabkan kelurahan memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak rakyat setempat.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kelurahan merupa unit pemerintah terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa yang mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat urgen, Kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas<sup>39</sup>

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelurahan adalah Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diatur lebih rinci dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Menurut ketentuan Undang-Undang tersebut, Kelurahan di beri pengertian sebagai: “Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>39</sup> Titik Triwuran dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2011), h. 258

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 186 (amndemen II) dan TAP MPR No. IV/MPR/2000. Dalam pasal 18B di sebutkan bahwa:

- a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan UndangUndang.
- b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang.<sup>40</sup>

## 2. Tujuan Kelurahan

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- g. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- h. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat.
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>41</sup>

### 3. Fungsi Kelurahan

Kelurahan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan dasar.
- b. Peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi.
- c. Tinggal di lingkungan yang sehat.
- d. Mampu mempratikkan perilaku hidup bersih dan sehat
- e. Tokoh masyarakat dan kader berperan aktif memberdayakan dan menggerakkan masyarakat.<sup>42</sup>

## F. Tinjauan Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

### 1. Sejarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Berawal dari terbentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa membuat kesepakatan supaya melakukan temu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tingkat nasional di Bandug pada tanggal 18-21 Juli 2000 telah berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra

<sup>41</sup> <http://gunungsamarindabaru.balikipapan.go.id/content/65/kelurahan>. Diakses pada 9 Juli 2021, Pukul 02.15.

<sup>42</sup> <https://promkes.kemkes.go.id/?p=1662>. Diakses pada 9 juli 2021, Pukul 02.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dideklarasikan pada tanggal 21 Juli tahun 2000 melalui forum Musyawarah Temu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>43</sup>

Dalam forum musyawarah temu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tingkat nasional tersebut akhirnya terjadi kesepakatan nasional yang dikenal dengan “Deklarasi Bandung” memuat 2 (dua) hal yang sangat fundamental yakni:

- a. Merubah nama lembaga ketahanan masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- b. Terbentuknya Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pemimpin Pusat (DPP) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Chrisye Kandouw, Sofia E. Pengemanan, Josef K. Kairupan, *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Rumoong Bawah*, (Yogyakarta: Zanaf Publishing, 2015), h. 2.

<sup>44</sup> Juita Lidya Tiwa, Rony Gosal, Alfon Kimbal, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di kelurahan Paaldu Kecamatan Paal Dua Kota Manado*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau sering disingkat dengan (LPMK) merupakan lembaga pengganti Lembaga Ketanahan Masyarakat Kelurahan atau yang dikenal dengan disingkat (LKMK), lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menurut Pasal 1 point (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan adalah “lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagi mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan”<sup>45</sup>

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat, bukan prakarsa atau keinginan dari pemerintah atau Lurah, dan keberadaan LPMK ini juga dijadikan sebagai mitra kerja Lurah dalam menampung dan mewujudkan berbagai aspirasi dan keinginan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan.<sup>46</sup>

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan lembaga yang diakui dan dibina oleh pemerintah, pemberian pengakuan oleh pemerintah terhadap keberadaan LPMK dengan wujud penerbitan SK oleh Lurah tentang kelembagaan LPMK. LPMK juga dibina oleh pemerintahan dengan berbagai pembinaan.

<sup>45</sup> RahyPunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Masyarakat di Indonesia*, (Yogyakarta: fdZanafa Publishing, 2015), h. 33.

<sup>46</sup> *Ibid*, h.142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Emil Salim Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada hakekatnya memiliki 2 (dua) makna pokok yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat kelurahan melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemapanan yang diharapkan.
- b. Memberikan wewenang secara professional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan diri. 11 Kemandirian masyarakat tidak berarti pemerintah akan membiarkan masyarakat berkembang tanpa ketetapan arah, tetapi pemerintah senantiasa responsif dalam mencermati permasalahan yang dihadapi masyarakat serta memberikan bantuan dan fasilitas agar masyarakat secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan.<sup>47</sup>
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra yang membantu pemerintah kelurahan dalam aspek perencanaan, pengendalian pada masyarakat dan menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan elemen

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang memiliki tanggung jawab bersama dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga atau wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bertujuan untuk mmampukan dan memandirikan masyarakat dengan berupaya mewujudkan masyarakat yang partisipatif.

Oleh karena itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam membantu tugas Lurah berperan sebagai:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai fasilitator
  - 1) Masyaemberakat ikut dalam merencanakan pembangunan
  - 2) Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mediator
  - 1) Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan
  - 2) Masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan.
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator
  - 1) Masyarakat memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun.
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator
  - 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Syarat-Syarat Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menurut Perda Kota Padang no 9 tahun 2017**

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Pendidikan minimal tamatan SMA sederajat.
- d. Berkelakuan baik.
- e. Berusia minimal 25 tahun dan/atau telah menikah.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Telah bertempat tinggal tetap paling sedikit 2 (dua) tahun di RT yang bersangkutan dan berdomisili diwilayah tersebut.
- h. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap masyarakat dalam rangka membangun Kelurahan.
- i. Tidak sebagai pegawai dikelurahan yang bersangkutan

**5. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

Pembentukan kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan prosedur sebagai berikut:

Lurah mengundang seluruh Ketua lembaga RW setempat dan tokoh masyarakat kelurahan untuk bersama-sama mengadakan musyawarah pembentukan lembaga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan hasil masyarakat kelurahan setempat, maka Lurah mengeluarkan rekomendasi izin kepada masyarakat untuk mengadakan musyawarah masyarakat untuk pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musyawarah masyarakat tentang pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dihadiri oleh ketua-ketua lembaga RW, tokoh masyarakat setempat, dan utusan dari pemerintah kelurahan sebagai peninjau, hasil musyawarah masyarakat kelurahan tentang pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dikirimkan kepada Lurah, dilengkapi dengan berita acara rapat dan daftar hadir peserta rapat. Lurah meminta persetujuan penerbitan SK pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kepada camat. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan usulan Lurah, maka Camat memberikan rekomendasi dan persetujuan penerbitan SK pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kepada Lurah atas rekomendasi persetujuan camat, maka Lurah menerbitkan SK pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.<sup>48</sup>

#### 6. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Pemerintah bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan rakyat, karena tujuan terbentuknya pemerintah adalah melealisasikan tujuan kepemimpinannya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Untuk itu, pemerintah yang bertanggung jawab harus berorientasi pada dua hal yaitu :

- a. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan bangsa.

---

<sup>48</sup> *Op.Cit*, h. 143

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemerintah yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya melakukan pencapaian tujuan nasional indonesia.

Apabila dibuka kembali kebijakan otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah pada saat sekarang ini, maka nampak jelas bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan dan evaluasi.<sup>49</sup> Otonomi kelurahan merupakan jawaban atas pengembangan potensi wilayah berbasis kebutuhan lokal, Dalam otonomi kelurahan, semua unsur di dalamnya bertanggung jawab secara bersama-sama untuk memikirkan kemajuan kelurahan. Salah satu utuk yang bertanggung jawab tersebut adalah lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

**7. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
  - 1) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.

<sup>49</sup> file:///D:/pembangunan%20menurut%20para%20ahli.pdf. diakses pada tanggal 15 juni 2021, Pukul 20.27



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.<sup>50</sup>

**b. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**

Fungsi lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menyusun rencana dan pelaksanaan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, mengerakkan partisipasi masyarakat secara gotong royong mendayagunakan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

**8. Tujuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya.

Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan non formal perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan “mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri” atau “membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri. Tujuan yang akan di capai melalui usaha

<sup>50</sup> Pandi Larenggam, Alden Laloma, Salmin Dengo, Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaund, JAP NO 31 VOL III 2015, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan<sup>51</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat kelurahan sehingga masyarakat kelurahan mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal.

Masyarakat yang berdaya ditandai oleh tiga ciri utama yakni : Pertama masyarakat yang mandiri secara ekonomi mengandung makna bahwa anggota masyarakat secara ekonomi dapat menghidupi dirinya dan keluarganya dengan pendapatan sendiri atau usaha sendiri. Kedua bebas secara politik ditandai oleh dua ciri yaitu : pertama bebas memberikan suaranya dalam pemilu; kedua bebas berupaya memperoleh keuntungan politik. Ketiga manusia yang berdaya adalah mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan dan pertolongan dari pihak lain. Kemampuan seseorang keluar dari masalah yang di hadapinya merupakan ciri utama dari manusia yang berdaya. Kalau pun mereka membutuhkan pertolongan manusia lain bukan berarti ia tidak mampu menyelesaikan masalahnya, akan tetapi supaya masalah yang di hadapinya lebih cepat selesai.

Pada hakikatnya partisipasi sosial mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam proses pembangunan, mengusahakan penyusunan program-program pembangunan melalui mekanisme dari

---

<sup>51</sup> Widjaja, H.A.W, 2005, *Otonomi kelurahan merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*, (grafindo persada, Jakarta.)h 169

bawah ke atas (bottom up), dengan pendekatan memperlakukan manusia sebagai subyek dan bukan obyek pembangunan. Keberdayaan rakyat merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan- pilihan, baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri maupun perubahan diri sendiri atas dasar kekuatan sendiri sebagai faktor penentu.<sup>52</sup>

## 9. Dasar Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Menjelaskan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

- b. Pasal 10 Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.

Menjelaskan bahwa Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

- c. Pasal 7 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>52</sup> Hasibuan S.P. Malayu, *Manajemen sumber daya Manusia*, (Semarang : 1995), h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain.
  2. Lembaga Adat.
  3. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
  4. RT/RW.
  5. Karang Taruna.
  6. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- d. Pasal 37 Peraturan daerah Kota Padang Nomor 9 tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- Menjelaskan bahwa setiap Kelurahan mempunyai 1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan temuan dari Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan Pembangunan di Kelurahan Purus

1. Peran lembaga Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Kelurahan Purus berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan belum Efektif dilihat dari masih adanya indikator indikator atau peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut belum terlaksana sepenuhnya. Rendahnya kepedulian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap tugasnya sendiri sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta menggerakkan swadaya gotong royong untuk meningkatkan pembangunan. Penulis mendapatkan bahwa tidak efektifnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Purus, terlihat dari tidak terlaksananya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator, Motivator, dan Dinamisator.

Meningkatkan pembagunan semangat gotong royong masyarakat sangat diperlukan, karna program-program pembangunan Yang dibuat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat akan membutuhkan swadaya masyarakat, baik berupa tenaga, pikiran, maupun finansial. Karna sejatinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan penggerak dari masyarakat untuk bergerak melakukan pembagunan. Jika Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri tidak bergerak aktif, maka sebaliknya masyarakat juga tidak akan bergerak dalam melakukan pembagunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purus kurangnya partisipasi dari masyarakat, karena masyarakat cenderung kurang tertarik untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan di wilayah Kelurahan, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kepada masyarakat.

### B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran untuk perbaikan dari program Pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat akan lebih aktif sebagai berikut :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memberi perhatian dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat, menggerakkan, mengajak, menghimbau atau mengundang masyarakat untuk berpartisipasi sehingga masyarakat akan lebih peduli terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Diharapkan kepada fasilitator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan agar lebih memotivasi masyarakat supaya kemandirian masyarakat dapat terwujud.
2. Masyarakat terlibat secara langsung di dalam program – program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purus, baik kaum Laki-laki maupun kaum perempuan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Purus

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan pusat statisti kota padang, *kota padang dalam angka tahun 2021*, Padang: CV Aditya, 2021
- Chrisye Kandouw, Sofia E. Pengemaman, Josef K. Kairupan, *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Rumoong Bawah*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009
- Sujono, *Mengembangkan potensi masyarakat di desa atau kelurahan* Yogyakarta: cv budi utama, 2012
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011
- Herdiansyah, Haris, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Juita Lidya Tiwa, Rony Gosal, Alfon Kimbal, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di kelurahan Paaldu Kecamatan Paal Dua Kota Manado*
- M. Hasan Ubaidillah, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, Surabaya: UIN SUNAN AMPEL Press, 2018
- RahyPunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Masyarakat Di Indonesia*, Yogyakarta: fdZanafa Publishing, 2015
- Sahilun A. Nasir, *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problema Remaja*, Jakarta: Kalam Mulia, 2002
- siti Dwiningrum, *Desentralisasi partisipasi Masyarakat Dalam pendidikan* Jogjakarta: pustaka Pelajar, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya), 1985
- Sondang P. Siagan, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Sunggono, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 2007
- Suriyaningrat, Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Sinar Terang

Titik Triwuran dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukuum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2011

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1975

Widjaja, H.A.W, *Otonomi kelurahan merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*, Jakarta : Grafindo Persada, 2005

Zainal Asikin DKK, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2008

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018, Tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Munawar nur, “*Pemberdayaan Masyarakat*”Jurnal Ilmiah Civis. Vol.1 No.2, Juli 2011

Pandi Larenggam, Alden Laloma, Salmin Dengo, Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaund, JAP NO 31 VOL III 2015, h. 4.

Delmira Syafrini, Nora Susilawati, dan Mira Hasti Hasmira, “*Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Mengembangkan Kawasan Wisata Keluarga*” Jurnal Sociens Vol. 3, No.2, Th. 2016

<https://www.ArsipKotaPadang>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arum Sutriani Putri “Pengertian otonomi daerah dan dasar hukumnya”  
<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/110000069/pengertian-otonomi-daerah-dan-dasar-hukumnya>. (Diakses pada 20 Desember 2020, pukul 23.24)

file:///D:/pembangunan%20menurut%20para%20ahli.pdf

<https://grobogan.go.id/info/artikel/579-pemberdayaan-masyarakat-dalam-pembangunan-desa>, diakses pada tanggal 15 juni, jam 19.27 tahun 2021

<https://langgam.id/kelurahan-purus-padang-barat-kota-padang/>.

<https://lpmkelurahanpurus.wordpress.com/lembaga-desa/lpm/visimisi-dan-tujuan-lpm/>

<https://padangkota.bps.go.id/>,

[https://web.facebook.com/353451161459884/posts/sejarah-lpm-lpm-dideklarasikan-pada-tanggal-21-juli-2000-melalui-forum-musyawara/396214813850185/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/353451161459884/posts/sejarah-lpm-lpm-dideklarasikan-pada-tanggal-21-juli-2000-melalui-forum-musyawara/396214813850185/?_rdc=1&_rdr)

<https://www.Republika.com.id/ragam/read/4398330/pengertian-gotong-royong-ketahui-nilai-nilai-yang-terkandung-di-dalamnya> , diakses pada tanggal 15 juni, jam 19.54 tahun 2021

Uci Putri Setia Ningsish “Pengertian dan bentuk-bentuk pemerintahan”.  
 file:///C:/Users/User/Downloads/(HAN)%20PENGERTIAN%20DAN%20BENTUK.pdf.(Diakses pada 20 desember 2020, Pukul 22. 49)

<https://www.promo-jitu.com/2016/08/objek-wisata-pantai-purus-padang.html>  
 Diakses pada 29 Juli 2021, Pukul 22.35

<https://sumbarprov.go.id/home/news/19456-mencikaraui-objek-wisata-pantai-padang.html> Diakses pada 29 juli 2021, Pukul 23. 00



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"Efektifitas Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kelurahan Purus Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan"* yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD RIZKY ALFARIZY**  
 NIM : 11727101988  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Agustus 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Drs. H. Zainal Arifin, M.A**

Sekretaris  
**Hellen Last Fitriani, SH., MH**

Penguji I  
**Dr. Hj. Hertina, M.Pd**

Penguji II  
**Lovelly Dwina Dahen, SH., MH**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.  
 NIP. 19750801 200701 1 023



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41090  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2920/2021 Tanggal 12 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

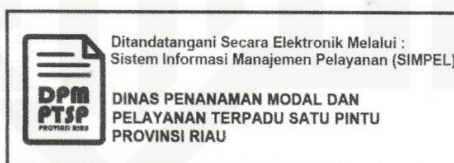
- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : MUHAMMAD RIZKY ALFARIZY  |
| 2. NIM / KTP         | : 11727101988  |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : EFEKTIFITAS PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN SWADAYA GOTONG ROYONG MASYARAKAT DI KELURAHAN PURUS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN&NBSP; |
| 7. Lokasi Penelitian | : LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PURUS KOTA PADANG  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 28 April 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342**  
**http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id**

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 570 / 887 - PERIZ/DPM&PTSP/IV/2021

**Rekomendasi Penelitian**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

**Memperhatikan :**

Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor : UN.04/F.I/PP.00.9/2920/2021 Tanggal 12 Maret 2021 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

**Nama :** Muhammad Rizky Alfarizy

**Tempat/Tanggal Lahir :** Padang 16-09-1997

**Pekerjaan :** Mahasiswa

**Alamat :** Jl. Pertanian Lubuk Minturun Sei Lareh

**Nomor Kartu Identitas :** 1371111609970005

**Judul Peneitian :** Efektivitas Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Di Kelurahan Purus Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

**Lokasi Penelitian :** Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purus Kota Padang

**Jadwal Penelitian :** 20 Mei 2021 s.d Oktober 2021

**Penanggung Jawab :** Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 April 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI SUMATERA BARAT

**MASWAR DEDI, A.P.M.Si**  
**NIP. 197406181993111001**



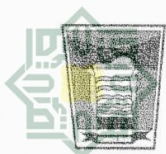
**Tembusan:**  
 1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.







**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Komplek Balaikota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1, By. Pass Aia Pacah, Padang

**REKOMENDASI**

Nomor : 200.5.854/Kesbangpol-Pdg/2021

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

2. Surat dari Dekan FSH UINSSKR

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2920/2021

tanggal 12 Maret 2021

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab penelitian Ybs,

tanggal 24 Mei 2021

Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian / Survey / Pemetaan / PKL / PBL (Pengalaman Belajar Lapangan) di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

Nama : **Muhammad Rizky Alfarizy**

Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 16 September 1997

Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Lubuk Minturun Seilareh

Nomor Handphone : 082172738869

Maksud Penelitian : Skripsi

Lama Penelitian : 1 (satu) bulan

Judul Penelitian / Survey : **Efektivitas Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Purus Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

Tempat Penelitian : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purus

Anggota Rombongan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat / Lokasi Penelitian.
2. Pelaksanaan Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di Daerah setempat / lokasi Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Wali Kota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang dalam kesempatan pertama.
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 24 Mei 2021

A.n. Walikota Padang

Kepala Kantor Kesbang dan Politik  
Kasi Ideologi Dan Wasbang



**JUFRIANDI S.SOS**

NIP. 196607141989031008

Diteruskan kepada :

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Ditangguhkan UIN Suska Riau



# PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN PADANG BARAT

Jalan Veteran No 85, Purus Kota Padang - Sumatera Barat 25115  
Telephone (0751) 27471

Padang, 25 Mei 2021 M

Nomor : 070. 21 / CPB / V / 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth.  
Saudara Lurah Purus  
di-  
tempat,-

Dengan hormat,

Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Nomor : 200.05.854 / Kesbangpol-Pdg / 2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan ini memberikan persetujuan penelitian kepada :

Nama : **Muhammad Rizky Alfarizy**  
Tempat / Tanggal Lahir : Padang, 16 September 1997  
Alamat : Jln. LuBuk Minturun SeiLareh  
Maksud Penelitian : Skripsi  
Waktu / Lama Penelitian : 1 (satu) Bulan  
Judul Penelitian / Survey : Efektivitas Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan Purus Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Tahun 2017 Tentang Pembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lokasi Penelitian : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purus

Anggota : - Orang

Akan melaksanakan penelitian / survey di Wilayah Saudara sesuai dengan judul yang tersebut di atas, dengan ketentuan penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.



**ERI SENDJAYA S.Sos.,M.Si.**  
NIP. 19700829 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Saudara Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang
2. Dekan FSH UINSSKR.
3. Yang bersangkutan
4. Pertiinggal

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN PADANG BARAT KELURAHAN PURUS

Jalan Purus I No. 2 Padang

Nomor : 070/ 99/KP-Pdg/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Padang, 31 Mei 2021

Kepada Yth.  
Bapak Ketua LPM Kel.Purus  
Di  
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan Surat Rekomendasi Penelitian dari Camat Padang Barat Nomor.070.21/CPB-V/2021 Tanggal 25 Mei 2021 perihal Rekomendasi Penelitian dengan ini memberi persetujuan penelitian kepada :

Nama	: Muhammad Rizky Alfarizy
Tempat/Tgl Lahir	: Padang/16 September 1997
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl.Lubuk Minturun Sei Lareh
Maksud peneliitian	: Penyusunan Skripsi
Waktu / Lama Penelitian	: 1 ( Satu ) Bulan
Judul Penelitian	:Efektivitas Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Swadaya Gotong royong Masyarakat Di kelurahan Purus Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. tahun 2017 Tentang Lembaga Permberdayaan Masayarakat
Lokasi Penelitian	: LPM Kelurahan Purus
Anggota	: -

Untuk melakukan penelitian di wilayah Bapak dengan judul penelitian tersebut diatas, dengan ketentuan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya. Untuk itu dimohon kepada Bapak untuk dapat membantu saudara kita tersebut melakukan penelitian.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

An. Lurah  
Sekretaris

**AFRIZAL,S.Sos**

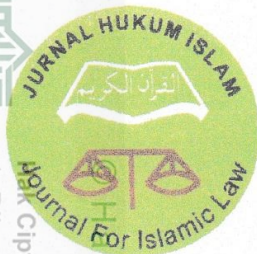
**Nip. 196604041986031006**



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : MUHAMMAD RIZKY ALFARIZY  
**NIM** : 11727101988  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : EFEKTIFITAS PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN  
PURUS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PADANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

**Pembimbing:** Basir, S.H.I., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Rizky Alfarizy lahir tanggal 16 September 1997 di Padang Sumatera Barat. Penulis merupakan anak Pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak Syafrizal Bahar dan Ibu Yelmi. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri 44 Padang pada tahun 2004 sampai 2010, setelah itu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Padang pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2013, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Padang dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan syarif kasim riau, fakultas syariah dan hukum mengambil jurusan Ilmu Hukum. Pada saat studi, penulis melakukan kegiatan magang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau pada tahun 2019, kemudian penulis lulus Dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021 dengan menyandang gelas Sarjana Hukum (SH).